

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1.1. Sejarah Desa Lembar Selatan

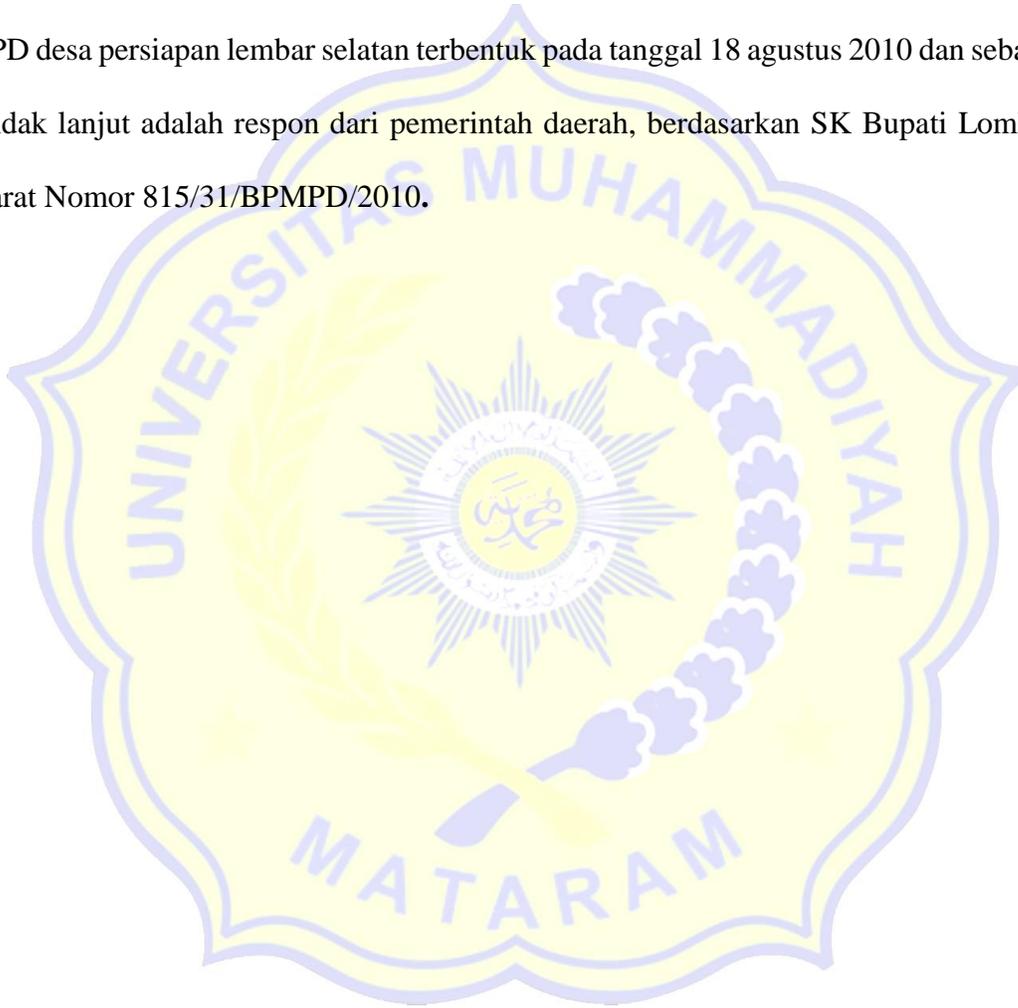
Asal mula terbentuknya DEsa Lembar Selatan yaitu berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan public memngingat pusat pemerintahan desa induk (Lembar) jaraknya cukup jauh sekitar 3 km dari Dusun Lembar, Puyahan, Padak, Cemare, Pesanggaran, Sepakat Segenter dan Batu samban,

Disamping itu Desa Lembar pada saat ini terdiri dari 11 dusun dengan bentang wilayah yang cukup luas sehingga menghambat pemerataan pembangunan dalam berbagai sector serta minimnya sarana transportasi yang menuju ke desa induk.

Atas dasr itulah bersama para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta masyarakat lainnya dari dusun lembar, puyahan, padak, Cemara, Batu Sumban dan penganggraan melakukan musyawarah bersama dan perjuangan serta proses yang cukup panjang dan lama, mereka bersama beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemuda lainnya secara bersama-sama mengusulkan pemekaran desa, tentu saja banyak halangan dan rintangan yang dihadapi, namun berkat dukungan masyarakat dari keenam dusun tersebut akhirnya kepala Desa Lembar (Drs. Lalu

Wiratakariadi) menyetujui pemekaran desa. Selanjutnya maka tepat pada tanggal 10 maret 2010 diadakanlah rapat warga bertempat di Aula Kantor Desa Lembar.

Pada rapat tersebut terbentuklah nama desa pemekaran menjadi Desa persiapan Lembar Selatan lengkap dengan perangkatnya, dan pembentukan anggota BPD desa persiapan lembar selatan terbentuk pada tanggal 18 agustus 2010 dan sebagai tindak lanjut adalah respon dari pemerintah daerah, berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor 815/31/BPMPD/2010.



1.1.2. Struktur Organisasi Desa Lembar Selatan



Sumber: Kantor Desa Lembar Selatan

1.1.3. Visi dan Misi Lembar Selatan

1. Visi

“Terwujudnya Desa Lembar Selatan Yang Mandiri dan Religius”

2. Misi

Juga telah ditetapkan misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Dsa agar Selain penyusunan visi tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi untuk memudahkan di dalam pelaksanaan program. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi serta kebutuhan masyarakat Desa Lembar Selatan sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Lembar Selatan adalah:

1. Meningkatkan pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan.
2. Melaksanakan roda pemerintahan yang efektif, transparan dan amanah serta meningkatkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
3. Memaksimalkan potensi BUMDes disegala bidang berdasarkan inovasi dan kreativitas.
4. Melakukan kerja sama potensi desa dengan instansi pemerintah, instansi swasta dan perguruan tinggi.

4.1.4. Peta Desa Lembar Selatan

Sebelah utara : Desa lembar
Sebelah Timur : Desa Jembatan Kembar
Sebelah Selatan : Desa Lebuan Tereng
Sebelah Barat : Laut Selatan Lombok

Sumber: *Desa Lembar Selatan*

4.1.5. Data Wilayah Desa Lembar Selatan

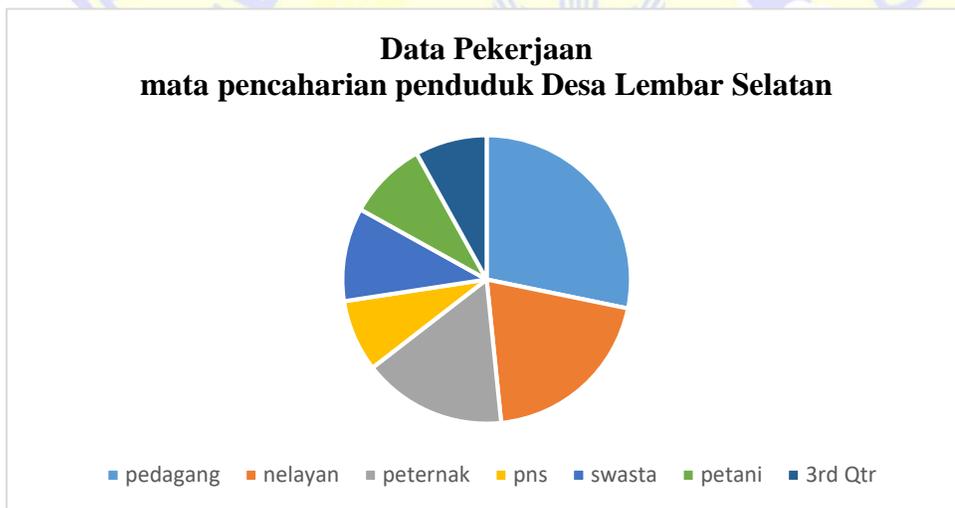
No	Nama Kepala Dusun	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Pemrmpuan	Jumlah Jiwa
1	Zulkipli	Lembar	396	519	515	1034
2	Nursan	puyahan	509	599	608	1207
3	Munawir	Cemare	410	661	705	1366
4	haris	pesanggaran	263	473	443	916
5	Suhaimi	sepakat	183	284	261	245
6	Zaenuddin	Serubung	339	611	576	1187
7	Masu'ud	Batu	283	454	451	905
8	Zaenal	Samban	158	286	543	543
9	Safi'i	Lawing	175	284	286	570

10	saefudin	Kute	281	411	414	825
11	jaenudin	segenter	453	764	704	1468

Sumber: Lembar Selatan

Table diatas merupaakn data penduduk yang ada di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat yang berjumlah 10.566 jiwa. Yang sebagian besar jumlah penduduk laki-laki yang berjumlah 5346 jiwa.

4.1.6. Data Pekerjaan Desa Lembar Selatan



Sumber: Desa Lembar Selatan

Warga Desa Lembar Selatan Kebanyakan bekerja sebagai pedagang dan sebagian besar juga menjadi nelayan karena dikawasan tersebut adalah wilayah yang dekat denga laut jadi tidak heran jika warga Desa Lembar selatan menjadi nelayan dan tidak sedikit juga sebagian warga Desa Lembar menajdi peternak. Jika dilihat dari

diagram di atas, warga yang menjadi pegawai Negeri sipil (PNS) di Desa Lembar Selatan sangat Sedikit di bandingkan dengan warga yang kerja sebagai petani.

4.2. Sejarah mangrove

Program Penataan yang juga melibatkan masyarakat membuat kawasan mangrove di pesisir Lembar Selatan Kecamatan Lembar kian eksotis. Wisatawan banyak memilih waktu sore hari untuk berkunjung sekaligus menikmati *Sunset*. Seiring waktu, pohon mangrove yang ditanam beberapa tahun lalu mulai besar dan membuat kawasan ini rimbun, teduh dan indah. Program penataan yang juga melibatkan masyarakat membuat kawasan mangrove di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar kian Eksotis. Wisatawan banyak memilih waktu sore hari untuk berkunjung sekaligus menikmati *Sunset*.

Seiring waktu, pohon mangrove yang ditanam beberapa tahun lalu mulai besar dan membuat kawasan ini rimbun, teduh dan indah kawasan ini ditata oleh Pemkab Lombok Barat bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan perikanan lewat program khusus.

Pantai Cemara salah satu dari 10 lokasi di Indonesia yang secara serentak ditanami mangrove oleh anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK). Di Dusun Cemra Lembar Selatan, dilakukan penanaman 5.000 ribu sejumlah satu juta pohon mangrove mau ketempat wisata di Lombok. Maka tidak mesti ke pantai atau ke air terjun karena sejak tahun 2016 kemarin sudah tersedia tempat wisata yang bernama wisata mangrove yang berada di Desa Lembar setelah Kecamatan Lembar di

Lombok Barat. Tempat ini sangat cocok untuk mengambil gambar model ataupun untuk selfie karena jembatan kayunya yang memanjang dan dibuatkan jurang pada tengah-tengah membuat pemandangannya menjadi menarik.

Ditambah sekelilingnya penuh dengan tanaman mangrove yang menjadi bahan utama wisata ini. Sejumlah artis Lombok juga membuat video klip di eko wisata mangrove, mereka mencicipi segala bentuk fasilitas yang ada disana. Karena disana sudah tersedia rumah terapung, rakit dan berugak yang disediakan untuk tempat berfotoan. Masyarakat sekitar juga mengambil kesempatan untuk merias perahunya supaya bisa disewakan kepada pengunjung dengan membayar Rp. 10.000 saja perorangnya kemudian pengunjung tersebut akan dibawa keliling disekitaran tanaman mangrove tersebut hingga menembus jembatan dusun Mangrove.

Dengan adanya wisata mangrove ini masyarakat sekitar yang tidak ada pekerjaan bisa memanfaatkannya dengan menarik biaya parkir Rp. 2.000 setiap sepeda motornya dan berjualan makanan ringan dan sebagainya disana. Eko wisata mangrove berjarak sekitar 3 km dari pelabuhan penyebrangan dilembar dan sekitar 1,5 Km dari pantai Cemare. Ekowisata Mangrove terkenal dengan jembatannya yang memanjang berbentuk seperti gambar petir karena ditengahnya dibuatkan belakon dan agak mecolok ke atas.

4.3. Kebijakan Pemerintah Dalam mengelola Pariwisata Mangrove

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekana khusus yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara visi, misi dan isu-isu strategi yang telah di tentukan.

Rencana strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan amanat RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 yang mengedepankan kebijakan pembangunan pariwisata di kabupaten Lombok Barat yang ditunjukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan hakekat dari otonomi daerah, potensi dan asset seni budaya daerah dan pariwisata, kemandirian, peranan serta potensi masyarakat, swasta, instansi terkait, dan perkembangan pembangunan pariwisata pada skala regional dan nasional. Kami berharap renstra ini secara umum dapat dipergunakan dan dipakai sebagai acuan atau referensi bagi insan (pelaku) pariwisata dalam menyusun proses pemrograman, perencanaan dan pengimplementasian kegiatan serta pelaksanaan system evaluasi kerja pada industry pariwisata dikabupaten Lombok Barat, Kahusunya Dinas pariwisata kabupaten Lombok Barat.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menempatkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu sector prioritas, perlu diikuti dengan langkah tidak lanjut yang kongkrit dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, bertahap, sinergis dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan

perwujudan renstra SKPD yang memuat harapan dan cita-cita dalam pembangunan dan kebudayaan dan pariwisata kabupaten Lombok Barat kedepan yang dijabarkan melalui penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program dan Kegiatan.

Akhirnya, Rencana Strategis Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lombok Barat ini dibuat agar dapat dijadikan arah dan pijakan atau melangkah dalam penanganan terhadap berbagai permasalahan-permasalahan kepariwisataan di kabupaten Lombok Barat sehingga dapat dilaksanakan secara tepat, terintegrasi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pemerintah membuat program peningkatan kemampuan sumber daya masyarakat dibidang pariwisata adalah merupakan unsur-unsur yang paling utama untuk mengembangkan potensi wisata yang ada disebuah daerah karena mampu merubah pola fikir masyarakat bagaimana cara mengelola destinasi pariwisata dengan optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pariwisata Lombok Barat pada tanggal 27 juni 2019 hingga 30 juni 2019 melaksanakan beberapa program peningkatan sumber daya masyarakat di bidang kepariwisataan yang meliputi manajemen tata kelola destinasi wisata, amajemen homestay dan pelatihan serta sertifikasi pramuwisata budaya sejarah pada tanggal 3 juli 2019 hingga 9 juli 2019 dan yang menjadi peserta pelatih berasal dari sekelompok sadar wisata Lombok barat.

Dinas Pariwisata Lombok Barat juga telah membentuk staf, yang terdiri atas dinas terkait, kepolisian, kepala desa, hingga pokdarwis agar pengembangan pariwisata berkelanjutan bisa berjalan secara maksimal. Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, Nasional, dan Global. Di undangkannya Undnag-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menggantikan Undnag-Undang 9 tahun 1990 telah memberikan arahan dan strategi pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan berbagai lingkungan strategis baik dalam lingkup daerah, nasional, regional amupun global.

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat bagian dari integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Daerah-daerah lainnya, kabupaten Lombok Barat memiliki potensi daya Tarik wisata alam, Budaya, dan adaya Tarik wisata hasil buatan manusia yang layak untuk dikembangkan guna memajukan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan dikabupaten Lombok Barat, maka di susunlah rencana induk

pembangunan kepariwisataan Daerah yang segala sesuatunya tertuang dalam peraturan Daerah ini.

4.4. Kendala Dalam Mengelola Wisata Hutan mangrove

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan pengamatan bahwa terdapat banyak kendala dan permasalahan di objek wisata hutan mangrove kendala yang di hadapi dalam mengelola hutan mangrove yang berada di Desa Lembar Selatan Dusun Pesanggaran yaitu sebagai Berikut:

1. Tidak adanya izin dalam mengelola atau membangun wisata mangrove.
2. Tanah atau lahan digunakan bukan milik pemerintah atau bukan milik warga setempat.
3. Memiliki anggaran dana yang sangat besar.
4. Tidak ada kemauan pemilik tanah untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah atau dinas terkait.
5. Tidak adanya kerja sama dari pihak swasta dengan aparat desa sejak awal pembangunan wisata mangrove yang berada di desa Lembar Selatan Dusun Pesanggaran.

“ berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf Dinas Pariwisata Bidang Desatinasi dan pengembangan, bapak Adrian Firmansyah Febriadi, Ss, beliau mengatakan bahwa wisata mangrove yang berada di desa lembar Selatan Dusun Pesanggaran tersebut tidak dapat dikelola oleh pemerintah karena tanah atau lahan yang berada di wisata mangrove bukan milik

pemerintah melainkan milik masyarakat luar dan wisata mangrove tidak memiliki izin pembangunan wisata mangrove, sehingga pemerintah setempat tidak berani mengelola ataupun mengembangkan. Dinas pariwisata telah melakukan observasi dan menawarkan kerja sama kepada pemilik tanah tetapi pemilik tanah tidak menyetujui kerjasama tersebut. Dengan alasan karena terlalu lamanya kontrak kerja yang di tetapkan oleh pemerintah setempat. Dinas pariwisata telah melakukan upaya sosialisasi tentang perijinan pembanguna pariwisata. (wawancara hari senin, 13 januari 2020 pukul 10.00 wita di kantor dinas Pariwisata).

Dari ahsil wawancara di atas dinas pariwisata berharap adanya kesadaran pengelola atau masyarakat dapat mengikuti aturan-aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, agar pemerintah setempat juga dapat mendukung, membantu dan melindungi dalam pengembangan dan pengelolaan wisata hutan mangrove yang berada di Desa Lembar Selatan Dusun Pesanggaran.

“Hasil wawancara dengan kepala Desa Lembar selatan H. Beny Basuki, ST mengatakan bahwa samasekali tidak tahutentang awal pembangunan wisata hutan mangrove tersebut karena beliau baru satu tahun menjabat menjadi kepala Desa Lembar Selatan dan tidak adanya data yang terkait dengan pembangunan wisata hutan mangrove tesebut. Beliau mengarahkan saya untuk langsung kepengelolaan wisata mangrove yang pernah aktif pada tahun 2016, tetapi bapak H. Beny Basuki ST Selaku kepala Lembar Selatan mengatakan ada rencana utnuk

melakukan perbaikan wisata mangrove yang berada di Dusun Pesenggran agar wisata mangrove tersebut dikenal oleh wisatawan dan dapat memperbaiki perekonomian yang ada di desa kami, ujarnya. (Wawancara Hari selasa 14 januari 2020 pukul 13.00 wita di Desa lembar Sealatan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan bapak H. Beny Iskandar, ST berharap agar masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu dalam pengelolaan wisata mangrove.

“hasil wawancara dengan bapak suhaimi selaku Kepala Dusun Pesanggaran Lembar Selatan dan selaku mantan pengelola wisata mangrove mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan pemerintah setempat. Dikarenakan, lahan dan tanah di daerah tersebut bukan milik pemerintah ataupun warga setempat melainkan warga luar daerah Lombok Barat sebagai kepala Dusun dan pengelola wisata Mangrove pada saat itu sebenarnya sudah menjalin kerja sama dengan baik dan pemilik lahan ataupun tanah. Tetapi, dengan seiring berjalannya waktu kami pengelola beri surat teguran dengan tuduhan pungli dari pihak yang berwajib, karena mengambil tarif kepada pengunjung serba Rp. 5.000 padahal tarif tersebut sebagian digunakan untuk tempat parkir pengunjung, dan sebagainya lagi digunakan perawatan dan kebersihan wisata mangrove tersebut, ujar bapak suhaimi selaku kepala Dusun Pesanggaran (wawancara pada tanggal 14 januari 2020 pukul 14.00 di kediaman bapak suhaimi).